

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

Jabatan : CAMAT MANGKUTANA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Pjs. BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangkutana, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR, CAMAT MANGKUTANA,

**Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | | **TARGET** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | | *(4)* |
| 1 | Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Mangkutana | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 87,40 |
| 2 | Meningkatnya Capaian Kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Mangkutana | Nilai Evaluasi SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat | Nilai | 71,55 |

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KANTOR CAMAT MANGKUTANA

TAHUN ANGGARAN : 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Program** | **Indikator Program** | **Target** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(5)* |
| 1. | Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 % |
| 2. | Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 % |
| 3. | Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | 100 % |
| 4. | Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan | 100 % |
| 5. | Meningkatnya Capaian Kinerja pada Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berjalan sesuai Standard an Ketentuan Perundangan yang Berlaku | 100 % |

**Program Anggaran Keterangan**

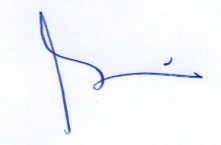
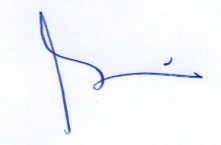
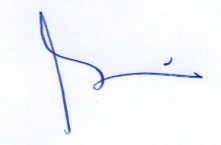
1. Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Rp. 2.877.638.950,- APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik Rp. 6.611.550,- APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 112.041.250.- APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umumnb Rp. 12.597.500.- APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 31.307.750.- APBD
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 25.675.800,- APBD

**Rp. 3.065.872.800,-**

Mangkutana, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR CAMAT MANGKUTANA,

**Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si** **ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

**LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA**

**KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA**

**PENJELASAN KINERJA**

**TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran :** Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Mangkutana

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah derajat mutu pelayanan pada Kantor Kecamatan Mangkutana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara wajar, efisien dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, hukum dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan Kantor Kecamatan Mangkutana merupakan hal yang sangat penting karena Kantor Kecamatan merupakan unit pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, segala macam bentuk pelayanan diberikan mulai dari pelayanan administrasi hingga pelayanan langsung yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan public secara berkala;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Relevansi | Formulasi | Sumber Data |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat   * Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public adalah melalui penyusunan indiks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan Kantor Kecamatan Mangkutana * Indeks kepuasan masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. | Pelayanan yang bermutu/ berkualitas merupakah salah satu tolak ukurnya kepuasan yang berefek terhadap keinginan masyarakat untuk kembali datang ke Kantor Kecamatan. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang diterima masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi faktor kepuasan pelanggan karena, dengan memberikan pelayanan yang baik maka pelanggan pun akan merasa nyaman. Tingkat kepuasan masyakat diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public (Kantor Kecamatan Mangkutana) dengan pengisian kuesioner. | IKM = Total dari Nilai Persepsi Perunsur x 100  Total Unsur yang terisi | Hasil Kuisioner |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaraan target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Penjelasan |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87,40 | Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) ditahun 2024 di tetapkan target 87,40 dan dalam pelaksanaannya diharapkan dpt tercapai 100%.  Terjadi perbedaan target antara renstra Kecamatan Mangkutana Kab. Luwu Timur dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada Renstra Kec. Mangkutana yaitu 82, dikarenakan pada tahun 2023 mengalami peningkatan melebihi target sebesar 107,64%, sehingga untuk target indikator kinerja tahun 2024 mengikuti capaian realisasi. |

**Penjelasan Kinerja 2**

**Uraian sasaraan**

Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Mangkutana, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Relevansi | Formulasi | Sumber Data |
| 1 | Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan di Kecamatan, Presentase capaian terhadap rata-rata ralisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Mangkutanai dalam 1 tahun, berkaitan dengan pencapaian  Nilai Sakip Hasil Evaluasi Internal Inspektorat  Inspektorat merupak salah satu tim sakip kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instasi pemerintah yang di sampaikan (LHE Lakip)  merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Evaluasi Internal Inspektorat Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan nilai rata-rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meningkat. Peningkatan ini  menunjukkan komitmen dan antusiasme kantor Kecamatan Mangkutana yang semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi sebagai bentuk pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah | Hasil evaluasi laporan SAKIP OPD oleh Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Penjelasan |
| 1 | Nilai Sakip Hasil Evaluasi Internal Inspektorat | 71,55 | Nilai SAKIP ditahun 2024 di tetapkan target 71,55 dan dalam pelaksanaannya diharapkan dpt tercapai 100%.  Terjadi perbedaan target antara renstra Kecamatan Mangkutana Kab. Luwu Timur dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pada Renstra Kec. Mangkutana yaitu 68 . Dikarenakan pada tahun 2023 mengalami peningkatan realisasi melebihi target nlai sakip tahun 2023 yakni 71,55, sehingga untuk target indikator kinerja tahun 2024 mengikuti capaian realisasi. |

****

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMUEL NASRANI, S.IP**

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

Jabatan : CAMAT MANGKUTANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangkutana, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

CAMAT MANGKUTANA, SEKRETARIS CAMAT,

**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST** **SAMUEL NASRANI, S.IP**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

SATUAN KERJA PERANGKAT D AERAH : KANTOR CAMAT MANGKUTANA

TAHUN ANGGARAN : 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar (%) | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program** | **Anggaran** | **Keterangan** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| I. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Rp. 2,877,638,950 | APBD |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 24,411,350 | APBD |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 2,068,356,226 | APBD |
| 3. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp. 13,691,650 | APBD |
| 4. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp. 47,090,550 | APBD |
| 5. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. 444,982,374 | APBD |
| 6. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 71,797,000 | APBD |
| 7. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 147,029,800 | APBD |
| 7. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 60,280,000 | APBD |

Mangkutana, 1 Oktober 2024

CAMAT MANGKUTANA SEKRETARIS CAMAT

**(ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST)** **(SAMUEL NASRANI, S.IP)**

**LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA**

**SEKRETARIS CAMAT**

**KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA**

**PENJELASAN KINERJA**

**TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja**

Uraian Sasaran

Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 8 (delapan) sasaran kegiatan. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan penunjang urusan pemerintah daerah secara wajar, efisien dan efektif sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan public secara berkala;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 8 (delapan) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Relevansi | Formulasi | Sumber Data |
| 1 | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu dimana dalam pelaksanaannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dilakukan pada periode-periode tertentu sehingga penyusunan dokumen dimaksud harus dilakukan tepat waktu agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. | Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi akan berdampak besar pada pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung, sedang berlangsung dan yang akan berlangsung. | Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi yang telah disusun di bagi dengan Jumlah dokumen yang ditargetkan dikali 100 | Hasil penyusunan laporan dokumen perencanaan |
| 2 | Perentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dimana penyelenggaraan administrasi keuangan harus dilaksanakan dengan tertib sesuai aturan yang berlaku. | Pelaksanaan administrasi keuangan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu organisasi, melaksanakan administrasi keuangan dengan baik merupakan pondasi yang kuat untuk stabilitas dan pertumbuhan organisasi (kantor kecamatan Mangkutana) | Hasil pelaksanaan administrasi keuangan dibagi dengan target administrasi keuangan di kali 100 | Laporan administrasi keuangan |
| 3 | Persentase administrasi BMD yang terselenggara dengan baik mengacu pada sejauh mana pengelolaan dan pengadministrasian asset daerah dilakukan secara efektif dan efisien. | Administrasi BMD yang terselenggara dengan baik merupakan serangkaian proses dan praktik yang efisien dalam pengelolaan asset daerah mencangkup inventarisasi, pemeliharaan, penggunaan, hingga pelaporan yang akurat | Hasil rekon aset | Laporan hasil rekon asset (barang milik daerah) |
| 4 | Persentase administrasi kepegawaian yang terselenggara dengan baik mengacu pada seberapa efektif dan efisien suatu organisasi dalam mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia | Administarsi kepegawaian yang terselenggara dengan baik mencangkup serangkaian proses dan sistem yang efektif dan efisien dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi, administrasi kepegawaian yang terselenggara dengan baik akan berkonstribusi pada kinerja organisasi secara keseluruhan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan pegawai | Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan di bagi target laporan di kali 100 | Laporan administrasi kepegawaian |
| 5 | Persentase administrasi umum yang diselenggarakan dengan baik mengacu pada seberapa efektif dan efisien suatu organisasi dalam mengelola kegiatan administratif yang mendukung operasionalnya | Administrasi umum yang terselenggara dengan baik mencangkup pengelolaan berbagai fungsi administratif yang mendukung operasional suatu organisasi, administrai umum yang terselenggara dengan baik akan berkonstribusi pada kelancaran operasional organisasai, meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mendukung pencapaian tujuan strategis | Capaian kinerja sub kegiatan dibagi target kegiatan di kali 100 | Capaian kinerja sub kegiatan |
| 6 | Persentase Pengadaan BMD yang diselenggarakan dengan baik mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang mikik daerah | Pengadaan barang milik daerah yang terselenggara dengan baik mencangkup pengelolaan berbagai fungsi administratif yang mendukung operasional suatu organisasi, pengadaan BMD yang terselenggara dengan baik akan berkonstribusi pada efektivitas penggunaan anggaran hingga peningkatan kualitas pelayanan public. | Capaian kinerja sub kegiatan dibagi target kegiatan di kali 100 | Capaian kinerja sub kegiatan |
| 7 | Persentase penyediaan jasa penunjang yang diselenggarakan dengan baik, Persentase penyediaan jasa penunjang yang diselenggarakan dengan baik dapat bervariasi tergantung pada jenis jasa dan konteksnya. Untuk mengukur hal ini, biasanya dilakukan survei atau evaluasi terhadap kepuasan pelanggan, kualitas layanan, dan efisiensi operasional | Penyediaan jasa penunjang yang terselenggara dengan baik melibatkan serangkaian proses untuk memastikan bahwa layanan tambahan yang mendukung operasional organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan penyediaan jasa penunjang yang terselenggara dengan baik, organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan, mendukung operasional sehari-hari dan mendukung pencapaian tujuan strategis | Capaian kinerja sub kegiatan dibagi target kegiatan di kali 100 | Capaian kinerja sub kegiatan |
| 8 | Persentase pemeliharaan BMD yang diselenggarakan dengan baik, mengacu pada tingkat efektivitas dan efisiensi dalam nmenjaga dan merawat asset milik daerah | Pemeliharaan BMD yang diselenggarakan dengan baik mencangkup berbagai proses yang bertujuan untuk menjaga dan merawat asset agar tetap dalam kondisi optimal, dengan melaksakanan pemeliharaan BMD dengan baik, organisasi dapat memastikan asset tetap berfungsi dengan baik, mengurangi biaya perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan public | Capaian kinerja sub kegiatan dibagi target kegiatan di kali 100 | Capaian kinerja sub kegiatan |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Penjelasan |
| 1 | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu | 100 | Target yang ditetapkan menunjukkan kondisi ideal (tertinggi) yang bisa di capai oleh Kantor Kecamatan Mangkutana |
|  | Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik |
|  | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang terselenggara dengan Baik |
|  | Persentase Administrasi Pendapatan Daerah yang terselesaikan dengan baik |
|  | Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terselenggara dengan baik |
|  | Persentase Administrasi Umum yang diselenggarakan dengan baik |
|  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselenggarakan dengan baik |
|  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang di selenggarakan dengan baik |
|  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik |



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MERI, S.Pi**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAMUEL NASRANI, S.IP**

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangkutana, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SEKRETARIS CAMAT, KEPALA SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

**SAMUEL NASRANI, S.IP** **MERI, S.Pi**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KANTOR CAMAT MANGKUTANA

TAHUN ANGGARAN : 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(5)* |
| 1. | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah | 2 Dok |
| 2. | Tersusunnya dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA SKPD | 2 Dok |
| 3. | Tersusunnya dokumen DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA -SKPD | 2 Dok |
| 4. | Tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan |
| 5. | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian | 12 Dok |
| 6. | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 8 Org |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kegiatan** | **Anggaran** | **Keterangan** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1 | Penyusunan Dokumen  Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. 11,095,000 | APBD |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan  Dokumen RKA-SKPD | Rp. 3,912,500 | APBD |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan  DPA-SKPD | Rp. 3,480,250 | APBD |
| 4 | Evaluasi Kinerja Perangkat  Daerah | Rp. 5,923,600 | APBD |
| 5 | Pendataan dan Pengolahan  Administrasi Kepegawaian | Rp. 11,390,550 | APBD |
| 6 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Rp. 35,700,000 | APBD |

Mangkutana, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SEKRETARIS CAMAT, KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

**SAMUEL NASRANI, S.IP**  **MERI, S.Pi**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA**

**SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

**PENJELASAN KINERJA**

**TAHUN 2024**

Penjelasan 1

**Sasaran** : TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah melakukan penyusunan dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran , Rencana Kerja Anggaran Perubahan, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran perubahan, Laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan, LKPJ dan laporan evaluasi.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **RELEVANSI** | **FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu | tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, tercermin dari presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu | Jumlah capaian penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar di bagi jumlah seluruh penunjang urusn perangkat daerah dikali 100% | Sub bagian perencanaan |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Penjelasan** |
| 1. | Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu | 100% | Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra.  Target Kinerja penyusunan dokumen perencanaan ditahun 2024 di tetapkan sebesar 100% dan dalam pelaksanaannya diharapkan dpt tercapai 100%.  Adapun dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun adalah : LAKIP,LKij (TW I,II,III dan IV), Laporan evaluasi RKPD (TW I, II, III, IV). |

Penjelasan 2

**Sasaran** : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH DENGAN BAIK

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **RELEVANSI** | **FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah | Semakin tinggi capaian presentase capaian kinerja administrasi kepegawaian berarti pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah semakin baik. | Jumlah capaian dokumen/laporan administasi kepegawaian dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang ditargetkan dikali 100% | Sub Bagian Kepegawaian |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Penjelasan** |
| 1. | Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 | Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra.  Target Kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah ditahun 2024 di tetapkan sebesar 100% dan dalam pelaksanaannya diharapkan dpt tercapai 100%.  Adapun dokumen dimaksud adalah, SKP,KGB, Kenaikan Pangkat dan pengusulan cuti |



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MANSYUR, S. Sos**

Jabatan : KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAMUEL NASRANI, S.IP**

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangkutana, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SEKRETARIS CAMAT, KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN,

**SAMUEL NASRANI, S.IP** **MANSYUR, S.Sos**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KANTOR CAMAT MANGKUTANA

TAHUN ANGGARAN : 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **SASARAN KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1 | Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 18 Org/Bulan |
| 2 | Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah | Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 laporan |
| 3 | Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan |
| 4 | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 9 paket |
| 5 | Tersedianya bahan logistik kantor | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 15 Paket |
| 6 | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 7 Paket |
| 7 | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan | 36 Dokumen |
| 8 | Terfasilitasinya kunjungan tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 96 Laporan |
| 9 | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 750 Laporan |
| 10 | Terlaksananya pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | 1 Unit |
| 11 | Terlaksananya pengadaan mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 4 unit |
| 12 | Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 3 Unit |
| 13 | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 2 Unit |
| 14 | Teragendanya penyediaan surat menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 12 Laporan |
| 15 | Terbayarnya Rekening telepon, listrik dan air | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan | 12 laporan |
| 16 | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 2 Laporan |
| 17 | Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 Laporan |
| 18 | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 2 Unit |
| 19 | Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 14 Unit |
| 20 | Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 1 Unit |
| 21 | Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 10 Unit |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan |  | Anggaran | Keterangan |
| *(1)* | *(2)* |  | *(3)* | *(4)* |
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan  ASN | Rp | 2,026,999,126 | APBD |
| 2. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Rp | 41,357,100 | APBD |
| 3. | Penatausahaan Barang Milik  Daerah pada SKPD | Rp | 13,691,650 | APBD |
| 4. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp | 4,086,080 | APBD |
| 5. | Penyediaan Bahan Logistik  Kantor | Rp | 5,753,044 | APBD |
| 6. | Penyediaan Barang Cetakan dan  Penggandaan | Rp | 7,153,250 | APBD |
| 7. | Penyediaan Bahan Bacaan dan  Peraturan Perundang-undangan | Rp | 3.600.000 | APBD |
| 8. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Rp | 195,785,000 | APBD |
| 9. | Penyelenggaraan Rapat  Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp | 228,605,000 | APBD |
| 10. | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp | 34,500,000 | APBD |
| 11. | Pengadaan Mebel | Rp | 18,750,000 | APBD |
| 12. | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Rp | 10,605,000 | APBD |
| 13. | Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp | 7,942,000 | APBD |
| 14. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp | 16,807,800 | APBD |
| 15. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp | 61,622,000 | APBD |
| 16. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp | 11,600,000 | APBD |
| 17. | Penyediaan Jasa Pelayanan  Umum Kantor | Rp | 57,000,000 | APBD |
| 18. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp | 19,550,000 | APBD |
| 19. | Pemeliharaan Peralatan dan  Mesin Lainnya | Rp | 8,380,000 | APBD |
| 20. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp | 25,800,000 | APBD |
| 21. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp | 6,550,000 | APBD |

Mangkutana, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SEKRETARIS CAMAT MANGKUTANA, KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN

**SAMUEL NASRANI, S.IP** **MANSYUR, S.Sos**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA**

**SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

**PENJELASAN KINERJA**

**TAHUN 2024**

Penjelasan 1

**Sasaran** : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN DENGAN BAIK

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, pencapaian tujuan untuk kepentingan Bersama sehingga system keuangan bisa teratur dan baik

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **RELEVANSI** | **FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Presentase administrasi keuangan terselenggara dengan baik | Semakin tinggi capaian presentase administrasi keuangan akan terselenggara dengan baik | Jumlah capaian dokumen/laporan administrasi keuangan dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan administrasi keuangan di kali 100% | Sub bagian Umum & Keuangan |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Penjelasan** |
| 1. | Presentase administrasi keuangan terselenggara dengan baik | 100 | Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir |

Penjelasan 2

**Sasaran** : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BMD PADA PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **RELEVANSI** | **FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Presentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Semakin tinggi capaian presentase barang milik daerah yang diadministrasikan maka akan terwujud administrasi barang milik daerah yang berkualitas | Jumlah capaian dokumen/laporan administasi barang milik daerah dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan barang milik daerah yang diadministrasikan dikali 100% | Sub Bagian umum & keuangan |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Penjelasan** |
| 1. | Presentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 100 | Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir |

Penjelasan 3

**Sasaran** : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH DENGAN BAIK

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **RELEVANSI** | **FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Semakin tinggi capaian presentase capaian kinerja administrasi umum maka akan terlaksana administrasi umum perangkat daerah yang baik | Jumlah capaian dokumen/laporan administasi administrasi umum dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah yang ditargetkan dikali 100% | Sub Bagian umum & keuangan |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **TARGET** | **PENJELASAN** |
| 1. | Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | 100 | Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir |

Penjelasan 4

**Sasaran** : TERSEDIANYA BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **RELEVANSI** | **FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Presentase BMD perangkat daerah penunjang urusan yang terpenuhi | Tersedianya BMD penunjang urusan pemerintah daerah tercermin dari BMD perangkat daerah penunjang urusan yang terpenuhi | Jumlah unit BMD yang diadakan dibagi jumlah unit BMD yang diadakan sesuai target dikali 100% | Sub Bagian umum & keuangan |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **TARGET** | **PENJELASAN** |
| 1. | Presentase BMD perangkat daerah penunjang urusan yang terpenuhi | 100 | Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir |

Penjelasan 5

**Sasaran** : TERSEDIANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI STANDAR

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **RELEVANSI** | **FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Semakin tinggi presentase capaian kinerja jasa penunjang urusan perangkat daerah maka akan tersedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai standar | Jumlah capaian dokumen/laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan dikali 100% | Sub Bagian umum & keuangan |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Penjelasan** |
| 1. | Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir |

Penjelasan 6

**Sasaran** : TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DAERAH DENGAN BAIK

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **RELEVANSI** | **FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan daerah tercermin dari indicator kinerja | Jumlah capaian pemeliharaan barang milik daerah dibagi jumlah seluruh pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara sesuai target dikali 100% | Sub Bagian umum & keuangan |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Penjelasan** |
| 1. | Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik | 100 | Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir |



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DARMAWATI, SE**

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

Jabatan : CAMAT MANGKUTANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangkutana, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

CAMAT MANGKUTANA, KASI. PEMERINTAHAN UMUM

**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST DARMAWATI, SE**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KANTOR CAMAT MANGKUTANA

TAHUN ANGGARAN : 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(5)* |
| 1. | Terlaksana rapat forum koordinasi pimpinan di kecamatan | Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan | 12 Dokumen |
| 2. | Terlaksananya fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa. | Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | 22 Dokumen |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sub Kegiatan** |  | **Anggaran** | **Keterangan** |
| *(1)* | *(2)* |  | *(3)* | *(4)* |
| 1. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Rp | 31,307,750 | APBD |
| 2. | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Rp | 5,391,800 | APBD |

Mangkutana, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

CAMAT MANGKUTANA, KASI. PEMERINTAHAN UMUM

**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST DARMAWATI,SE**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA**

**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM**

**PENJELASAN KINERJA**

**TAHUN 2024**

Penjelasan 1

**Sasaran** : Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah koordinasi antar pihak PORKOPIMCAM Kecamatan Mangkutana yang dilaksanakan setiap bulannya membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **RELEVANSI** | **FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Presentase capaian kinerja koordinasi pemberdayaan desa yang dilaksanakan | Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Jumlah pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan dibagi sesuai target dikali 100% | Seksi Pemerintahan Umum |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **TARGET** | **PENJELASAN** |
| 1. | Presentase capaian kinerja koordinasi pemberdayaan desa yang dilaksanakan | 100 | Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir |

Penjelasan 2

**Sasaran** : *Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah koordinasi dalam mengawasi program kegiatan desa, melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penyusunan RAPBDesa, serta pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **RELEVANSI** | **FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan | Terlaksananya kegiatan fasilitasi, rekomendai dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan baik | Jumlah fasilitasi, rekomendai dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dibagi sesuai target dikali 100% | Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Penjelasan** |
| 1. | Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan | 100 | Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir |



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD, S.AN**

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

Jabatan : CAMAT MANGKUTANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangkutana, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

CAMAT MANGKUTANA, KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA,

**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST** **AHMAD, S.AN**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KANTOR CAMAT MANGKUTANA

TAHUN ANGGARAN : 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(5)* |
| 1. | Terwujudnya partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa | 10 Lembaga |
| 2. | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan | 12 Laporan |
| 3. | Terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan | Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah kecamatan | 12 Laporan |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sub Kegiatan** |  | **Anggaran** | **Keterangan** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* |  | *(4)* |
| 1. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Rp | 13,231,000 | APBD |
| 2. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp | 98,810,250 | APBD |
| 3. | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Rp | 20,284,000 | APBD |

Mangkutana, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

CAMAT MANGKUTANA, KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA,

**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST** **AHMAD, S.AN**

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2024

Penjelasan 1

**Sasaran** : TERLAKSANANYA KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN DESA

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah koordinasi dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat dan Perempuan serta pengawalan pengusulan Pembangunan dalam kegiatan musrengbang

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **RELEVANSI** | **FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa yang Dilaksanakan | Terlaksananya kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang baik | Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa dibagi sesuai target dikali 100% | Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Penjelasan** |
| 1. | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa yang Dilaksanakan | 100 | Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir |

Penjelasan 2

**Sasaran** : TERLAKSANANYA FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah koordinasi dalam mengawasi program kegiatan desa, melakukan fasilitasi dalam Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa serta pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **RELEVANSI** | **FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan | Terlaksananya kegiatan fasilitasi, rekomendai dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan baik | Jumlah fasilitasi, rekomendai dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dibagi sesuai target dikali 100% | Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **PENJELASAN** |
| 1. | Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan | 100 | Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir |



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WARSI SALIPADANG, S.E, M.Si**

Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

Jabatan : CAMAT MANGKUTANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangkutana, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

CAMAT MANGKUTANA, KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST WARSI SALIPADANG, S.SE, M.Si**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KANTOR CAMAT MANGKUTANA

TAHUN ANGGARAN : 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(5)* |
| 1. | Terlaksananya pelayanan Administrasi Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan | 12 Dokumen |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kegiatan** |  | **Anggaran** | **Keterangan** |
| *(1)* | *(2)* |  | *(3)* | *(4)* |
| 1. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Rp | 6,611,550 | APBD |

Mangkutana, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

CAMAT MANGKUTANA, KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST** **WARSI SALIPADANG, S.E, M.Si**

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2024

Penjelasan 1

**Sasaran** : TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan pelayanan publik dengan memfasilitasi administrasi perizinan usaha dan non usaha, surat rekomendasi kegiatan dalam wilayah kecamatan Mangkutana serta pelayanan kependudukan.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **RELEVANSI** | **FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Presentase capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan kepada camat yang dilaksanakan | Terlaksananya kegiatan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat dengan baik | Jumlah pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan dibagi sesuai target dikali 100% | Seksi Pelayanan Umum |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **TARGET** | **PENJELASAN** |
| 1. | Presentase capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan kepada camat yang dilaksanakan | 100 | Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga ukuran keberhasilan dengan banyaknya administrasi lain yang dikeluarkan |



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUSLIM, S.Pd**

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

Jabatan : CAMAT MANGKUTANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangkutana, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

CAMAT MANGKUTANA, KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM,

**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST MUSLIM, S.Pd**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KANTOR CAMAT MANGKUTANA

TAHUN ANGGARAN : 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(5)* |
| 1. | Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. | Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, tantara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan | 12 Laporan |
| 2 | Terlaksananya rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban | Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | 8 Laporan |
| 3 | Terlaksananya koordinasi/sinergitas dengan polri atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah laporan koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 8 Laporan |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sub Kegiatan** |  | **Anggaran** | **Keterangan** |
| *(1)* | *(2)* |  | *(3)* | *(4)* |
| 1. | Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Rp | 4,522,000 | APBD |
| 2 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Rp | 4,016,500 | APBD |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah yang  tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia. | Rp | 4,059,000 | APBD |

Mangkutana, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

CAMAT MANGKUTANA, KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM,

**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST** **MUSLIM, S.Pd**

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2024

Penjelasan 1

**Sasaran** : TERLAKSANANYA KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah hasil koordinasi terkait penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban serta pengamanan kegiatan Masyarakat. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **RELEVANSI** | **FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | Terlaksananya koordinasi terkait sosialisasi dan pengawasan terkait ketentraman dan ketertiban dapat tergambar dari laporan hasil pelaksanaan koordinasi | Jumlah capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah seluruh kegiatan koordinasi sesuai target dikali 100% | Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Penjelasan** |
| 1. | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | 100 | Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga ukuran keberhasilan permasalahan terkait laporan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti |

Penjelasan 2

**Sasaran** : *Terlaksananya Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada*

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah hasil koordinasi terkait penanganan semua laporan dan temuan pelanggaran perda/perkada. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **RELEVANSI** | **FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada | Terlaksananya koordinasi terkait tertanganinya pelanggaran perda/perkada tercermin dari presentase koordinasi terkait perda/perkada yang ditegakkan | Jumlah capaian koordinasi terkait pelanggaran perda/perkada yang ditegakkan dibagi sesuai target dikali 100% | Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Penjelasan** |
| 1. | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada | 100 | Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga ukuran keberhasilan permasalahan terkait koordinasi penegakan perda/perkada yang ditindaklanjuti |